

PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2005-2013)

Kukuh Putranda Juniardi

Siti Ragil Handayani

Devi Farah Azizah

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

kukuhputranda@gmail.com

ABSTRACT

The goals of study is to determining the effect of tax assessments (letter) and billing action active to disbursement of corporate income tax arrears (Studies in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara at 2005-2013). The type of research use in this study is explanatory research quantitative-approachly. This study used secondary data from documentation collecting techniques. In analyzing the data, this study applied classical assumption test and multiple linier regression. The results of the study, tax assessment and active billing simultaneously significant effect to total disbursement of arrears of corporate income tax. Partially active billing variables have no significant effect on the amount of the disbursement of corporate income tax, variable tax decree has a significant effect on the amount of the disbursement of arrears corporate income.

Key words : *tax, tax liability, tax assessment (letter), income tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial atau sendiri variabel penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan Pajak Penghasilan Badan dan variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

Kata kunci : *Pajak, Utang pajak, Surat Ketetapan Pajak, Pajak Penghasilan*

PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Malang Utara memiliki potensi yang baik, dari kurang lebih 2 juta Wajib Pajak terdaftar hanya 26% yang melakukan kewajiban perpajakan sehingga memungkinkan terdapatnya Wajib Pajak badan di Kota Malang yang tidak melaporkan SPT tepat waktu, atau tidak melaporkan SPT sama sekali, sehingga terjadi tunggakan, berikut ini data tunggakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara periode 2011-2013:

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara 2011-2013

Tahun	Jumlah utang pajak	Selisih dalam rupiah	Selisih dalam persen
2011	Rp 313.196.731	Rp 78.312.966	56,93 %
2012	Rp 134.883.765	Rp 115.543.346	85,66 %
2013	Rp 19.339.819		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 jumlah tunggakan pajak masih tergolong cukup tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2011 jumlah tunggakan Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan dari Rp. 313.196.731 menjadi Rp. 134.883.765, tetapi penurunan jumlah tunggakan pajak Penghasilan Badan yang signifikan terjadi pada tahun 2013 yang mengalami penurunan sebesar 85,66% dari Rp.134.883.765 menjadi Rp. 19.339.819, besarnya penurunan jumlah tunggakan Pajak Penghasilan Badan tersebut berarti pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan cukup tinggi, hal itu dikarenakan para Wajib Pajak Badan sadar akan kewajiban perpajakannya. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang terdapat pada tahun 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara masih berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak yang cukup tinggi dari tunggakan yang masih tertagih tersebut, dengan cara melakukan tindakan penagihan aktif maupun pasif. Besarnya tunggakan yang terjadi pada Pajak Penghasilan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Malang Utara.

Kementrian Keuangan mempunyai instansi yang bertugas untuk menangani penerimaan negara di bidang pajak yaitu Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Malang Utara yang bernaung di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III. Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi saat ini telah melayani pembayaran segala jenis pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Malang utara.

Terdapat 26% wajib pajak dari total kurang lebih 2 juta wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga ada kemungkinan Wajib Pajak Badan di Kota Malang yang tidak melaporkan SPTnya atau melaporkan SPT tidak tepat waktu. Penyampaian SPT oleh wajib pajak merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Aktifitas tersebut tidak menggantungkan kepada adanya surat ketetapan pajak, jadi para fiskus tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan/ 2 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka Dirjen Pajak akan melakukan Tindakan Penagihan Aktif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah variabel Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif berpengaruh secara parsial terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan? Apakah variabel Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif berpengaruh secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Mengetahui pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif secara parsial terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penghasilan Badan. Mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Ada beberapa definisi yang dijadikan acuan, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil beberapa pengertian yang cukup mewakili unsur-unsur yang terkandung dalam pajak.

Resmi (2012 : 1):

“pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Pajak Penghasilan

Mulyono (2011:1):

“pajak penghasilan adalah pajak yang masih harus dibayar atas berbagai jenis penghasilan, yang sudah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak”.

Ketetapan Pajak

Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

“surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. ada beberapa macam surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.”

Utang Pajak

Menurut Kurniawan (2006:1) pengertian utang pajak adalah sejumlah pajak berupa sanksi administrasi bunga, denda, atau kenaikan yang masih jadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2008:8):

“utang pajak timbul sesuai dengan ajaran formal maupun material, yakni sebagai berikut :

a. menurut ajaran material

wajib pajak berkewajiban membayar pajaknya tidak bergantung pada surat ketetapan pajak.

sebagai contoh, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 / angsuran bulanan oleh wajib pajak, pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan (bphb) melalui surat setoran bphb.

b. menurut ajaran formal

direktorat jenderal pajak mengeluarkan tagihan pajak kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya berupa surat tagihan pajak (stp), surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (skppkb), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.”

Utang pajak akan berakhir atau dihapus jika disebabkan oleh hal-hal berikut :

1) Adanya Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Maksud dari pembayaran adalah dibayar dan dilunasi oleh wajib pajak dengan uang dalam bentuk rupiah di tempat membayar pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti di kantor pos dan giro, bank swasta persepsi yang telah ditunjuk, dan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

2) Adanya Kompensasi Pembayaran Pajak

Kompensasi pembayaran yaitu pelunasan utang pajak yang dilakukan melalui proses pemindahan buku, karena wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi hanya dapat dilakukan terhadap utang dengan jenis pajak yang sama, tetapi Tahun pajaknya berbeda, atau bisa dilakukan atas jenis pajak lainnya.

Penagihan Pajak

Undang-undang pajak nomor 19 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa :

“penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya agar membayar biaya pajak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak dengan cara memberikan surat teguran atau memperingatkan, melaksanakan penagihan aktif maupun pasif dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Tindakan penagihan pajak merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dari mata rantai sebelumnya sejak dimulainya pemeriksaan atau penelitian, penetapan, dan penerbitan penetapan.

Jenis tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

a. Penagihan aktif

Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

b. Penagihan pasif

Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara menghimbau dari tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi wajib pajak melalui telepon, mengundang wajib pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada wajib pajak, meminta kepada wajib pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

Perumusan Hipotesis

1. Diduga Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara simultan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.
2. Diduga Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara parsial Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.
3. Diduga Surat Ketetapan pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory (explanatory research)*, Singarimbun (2008:3):
“penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi jumlah pencairan tunggakan pajak, jumlah surat penagihan aktif dan jumlah surat ketetapan pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan terbagi dalam data triwulan mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2013.

Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2009:210) analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan mengenai pengaruh antar variabel bebas secara bersamaan dengan salah satu variabel terikatnya. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + \mu$$

Dimana:

Y = Jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan

b_1 - b_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

X_1 = Surat ketetapan pajak

X_2 = Tindakan Penagihan Aktif

μ = *Error Term*

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F menurut Kuncoro (2009:239) pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Adapun langkah-langkah dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut :

1) Menentukan *Null Hypothesis* (H_0)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Artinya kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

$$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Artinya kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.

2) Menentukan *Level of Significance* (α) = 5%

- 3) Menentukan nilai F dengan menggunakan program *SPSS for Windows*.
- 4) Membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel}
 H_0 diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau jika probabilitas $F_{hitung} > \alpha$, dan H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$.
 Signifikan atau tidaknya uji F dapat dilihat dari angka signifikan uji F lebih kecil dari tingkat signifikan α , maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikan α tertentu secara statistik variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Menurut Kuncoro (2009:238) Uji statistik t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Langkah-langkah uji t sebagai berikut :

- 1) Menentukan *Null Hypothesis* (H_0)
 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$
 Artinya kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.
 $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$
 Artinya kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.
- 2) Menentukan *Level of Significance* (α) = 5%
- 3) Membandingkan T_{hitung} dan T_{tabel}
 H_0 diterima apabila $T_{hitung} \leq T_{tabel}$ atau jika probabilitas $T_{hitung} > \alpha$, dan H_0 ditolak apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau jika probabilitas $T_{hitung} \leq \alpha$.
 Jika angka signifikan Uji t lebih kecil dari tingkat signifikan α , maka H_0 ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi α tertentu secara statistik variabel independen secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi

Ghozali (2009:83) menyatakan koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika *Adjusted R Square* mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Surat Ketetapan Pajak (X_1), jumlah Surat Penagihan Aktif (X_2), terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Y). Hasil perhitungan SPSS 22 menunjukkan persamaan regresi variabel jumlah surat ketetapan pajak dan surat penagihan aktif yang diterima dan jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang diterima. Persamaan regresi yang digunakan yaitu sebagai berikut : $Y = 0,460 X_1 - 0,183 X_2 + \mu$. Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) $b_1 = 0,460$
 berdasarkan dari hasil perhitungan SPSS 22 menunjukkan variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak dapat diketahui bahwa beta X_1 menunjukkan hasil sebesar 0,460, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Surat Ketetapan Pajak (SKP) mempunyai hubungan yang searah dengan Pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan Surat Ketetapan Pajak sebesar satu satuan, maka variabel Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 46 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi bersifat konstan.
- 2) $b_2 = -0,183$
 berdasarkan dari hasil perhitungan SPSS 22 menunjukkan variabel jumlah Surat penagihan aktif dapat diketahui bahwa beta X_2 menunjukkan hasil sebesar -0,183, hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah surat Penagihan Aktif mempunyai hubungan yang

berlawanan arah dengan jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan Surat Penagihan Aktif sebesar satu satuan, maka variabel pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,3 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah konstan.

2. Hasil Uji Statistik

a. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Menurut Kuncoro (2009 : 239) :

“uji f atau uji simultan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan dengan variabel dependen”.

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS diperoleh hasil dari nilai F_{hitung} sebesar 5,170, sedangkan hasil dari nilai F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df_1 = 2$; $df_2 = 33$) sebesar 3,27. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai dari $F_{hitung} > F_{tabel} = 5.170 > 3.27$, atau nilai signifikansi (*Sig*) sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

b. Uji statistik t atau Uji Parsial

Uji statistik t atau uji parsial dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2009:238). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan besarnya angka t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan tabel hasil uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Variabel X_1 yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,028 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 5\%$; 2,5% (uji 2 sisi); $df = 33$) sebesar 2,035, dimana nilai t_{hitung} (3,028) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,035) atau nilai *Sig* (0,005) lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

a. Pengujian Hipotesis kedua

Uji hipotesis kedua menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif secara parsial memiliki pengaruh terhadap

Pencairan Tunggakan Pajak. Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan dengan membandingkan besarnya angka t_{hitung} dengan t_{tabel} maupun dengan melihat koefisien sig.

1) Variabel Surat Ketetapan Pajak

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa variabel jumlah Surat Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,028 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 33$) sebesar 2,035 sehingga nilai t_{hitung} (3,028) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,035) atau nilai *Sig* (0,005) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

Hubungan surat ketetapan pajak searah dengan pencairan tunggakan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa surat ketetapan pajak merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak.

2) Variabel Penagihan Aktif

Variabel jumlah Surat Penagihan Aktif memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,204 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 33$) sebesar 2,035 sehingga nilai t_{hitung} (-1,204) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,035) atau nilai *Sig* (0,237) $> 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hasil ini memberikan arti bahwa penagihan aktif memiliki pengaruh yang kecil terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

Hubungan negatif antara jumlah surat penagihan aktif dengan pencairan tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak badan tidak memandang bunga yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara apabila tidak membayar utang pajaknya sama sekali maupun tidak membayar utang pajaknya secara tepat waktu, hal ini dikarenakan bunga yang diberikan dianggap terlalu kecil oleh wajib pajak badan sehingga mereka lebih memilih menunda membayar pajak yang terutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Utara mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Surat Ketetapan pajak merupakan salah satu cara untuk mencairkan tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.
2. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa tindakan Penagihan Aktif mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara tepat, maka akan menyebabkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar. Namun sebaliknya, jika tindakan pengihan aktif tidak dilakukan dengan tepat, maka akan menyebabkan jumlah tunggakan pajak yang dicairkan akan semakin kecil.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda variabel surat ketetapan pajak memiliki nilai beta yang lebih besar daripada tindakan penagihan aktif, hal ini mengindikasikan bahwa surat ketetapan pajak merupakan variabel dominan untuk mempengaruhi pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

Saran

1. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen maupun dependen dan memperluas sampel penelitian dengan menambahkan wajib pajak pribadi sebagai obyek penelitian, sehingga nilai *Adjusted R Square* dapat ditingkatkan karena pada penelitian ini *Adjusted R Square* bernilai kecil, yaitu sebesar 0.192 yang berarti hanya 19,2% jumlah pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat ketetapan pajak dan penagihan aktif, sedangkan sisanya 80.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.
2. Lebih mengintensifkan lagi kinerja fiskus dalam melakukan tindakan penagihan aktif melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara harus

meningkatkan upaya peningkatan pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai manfaat pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosialisasi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta sosialisai peraturan perpajakan baru.

4. Aparat pajak harus tegas dalam menyikapi tunggakan pajak yang terjadi akibat kelalaian wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadi, Moelyo. 2003. *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Cetakan Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonom*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak*. Malang: Bayu Media.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyono. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. 2008. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahyono, Ahmadan Hussein, M. Fakhri. 2005. *Perpajakan, Edisi Kedua*, Yogyakarta: UUPP AMP YKPN.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) tentang yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2007 tentang beberapa ketentuan pajak yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Ketetapan, Surat Ketetapan tersebut berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).